

Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Untuk Pemerintah Daerah dan
Pemangku Kepentingan Lainnya

Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyusun:
Sari Angraeni

Kontributor:
Elih Dalilah
Sandri Justiana
Irawati
Dotty Rahmatiasih

Supervisi:
Aida Ratna Zulaiha

Penanggungjawab:
Wawan Wardiana

ISBN : 978-602-9488-15-9

200+iv
Cetakan I : Jakarta Desember 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan serta non komersial lainnya, dan bukan untuk diperjualbelikan

kata pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Buku “Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya’ telah selesai disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buku ini merupakan output pembelajaran dari pengalaman yang sedang KPK lakukan dalam menjalankan program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga. Sampai hari ini, KPK bersama dengan elemen masyarakat yang terlibat terus berupaya mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap program yang sedang dijalankan ini.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran dan wawasan yang mudah dicerna tentang gambaran program, bagaimana melaksanakan program, dan mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk kreatif memulai gerakan sosial pencegahan korupsi berbasis keluarga di wilayahnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun kontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Desember 2016,

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi

daftar isi

Daftar Isi	iii
Pendahuluan	01
Latar Belakang	02
Tujuan	05
Urgensi Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga	07
Urgensi Program	08
Langkah-Langkah Membangun Program	15
Langkah-Langkah Membangun Program	16
Baseline Studi Program	19
Intervensi Program	30
Pengukuran Program	41
Faktor Keberhasilan dan Penghambat Program	43
Faktor Keberhasilan Program	44
Faktor Penghambat Program	47
Penutup	49
Daftar Pustaka	52
Lampiran	53
Dokumen LFA Final	54
Modul 'Agar Anak Jujur' untuk orangtua beserta alat peraga dan media pembelajaran lainnya	62
Buku harian orangtua (pemantauan perkembangan anak)	148
Modul Relawan Ber-Aksi	150
Buku Aktivitas Relawan	194
Buku Family Visit Relawan	196

01

pendahuluan

Bagian ini menerangkan latar belakang dan tujuan pentingnya penyusunan buku ini



LATAR **BELAKANG**

Upaya pemberantasan korupsi tak bisa dengan memangkas yang terlihat saja. Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan juga memunculkan tatanan sosial baru yang bebas korupsi.

Adalah keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, yang diharapkan menjadi inti gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga dapat mempengaruhi individu dan berperan signifikan membangun budaya antikorupsi, sehingga menjadi sandaran harapan, tuntutan, dan keinginan dari sistem sosial yang lebih besar. Keluarga juga merupakan pendukung kekuatan potensial generasi mendatang yang akan mengambil alih kepemimpinan negeri ini.

Pentingnya pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga setidaknya beranjak dari dua hal.

Pertama, mulai bermunculannya kasus korupsi yang melibatkan keluarga. Dari data kasus korupsi di KPK saja, setidaknya ada 9 kasus korupsi yang melibatkan keluarga:

Suami dengan istri pada kasus yang sama	
1. Gatot Pudjo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara) dan Evy Susanti (Istri)	1. Suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan (2015)
2. Romi Hertan (Walikota Palembang) dan Masyitoh (Istri)	2. Suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (2013)
3. Budi Anton Aljufri (Bupati Empat Lawang) dan Suzanna Budi Antoni (Istri)	3. Suap sengketa Pilkada di MK (2013)
4. Ade Swara (Bupati Karawang) dan Nurlatifah (Istri)	4. Memeras PT Tatar Kertabumi, Karawang dalam pengurusan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (2015)
Suami dengan istri pada kasus yang berbeda	
M. Nazaruddin (Anggota DPR RI) dan Neneng Sri Wahyuni (Istri)	M Nazaruddin: Suap dari perusahaan pemenang lelang proyek Wisma Atlet, PT Duta Graha Indah (mengintervensi proses pemenangan perusahaan tersebut). (2010) Neneng Sri Wahyuni: Kasus Penunjukan Langsung Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Neneng sebagai penghubung antara PT Alfindo dan PT Sundaya Indonesia sebagai perusahaan sub kontrak dalam proyek itu). (2008)
Orangtua dengan Anak	
Zulkarnaen Djabar (Anggota DPR) dan Dendy Prasetya (Anak)	Korupsi terkait proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al Quran di Kemenag (2011-2013)
Kakak dengan Adik	
Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) dan Tubagus Chaeri Wardana (Adik)	Korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten (2011-2012)

Tabel 1
Kasus Korupsi Melibatkan Keluarga Yang Ditangani oleh KPK

Sumber: KPK (diolah)

Selain kondisi pelaku korupsi pada tabel diatas, kondisi lainnya adalah pelaku korupsi banyak yang menggunakan anggota keluarga lainnya dalam pencucian uang hasil tindak pidananya. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa korupsi telah memasuki ruang kehidupan di dalam keluarga, tidak hanya sekedar percakapan namun telah menjadi perilaku korup bersama. Keluarga yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai moral, justru larut dan terlibat dalam perbuatan yang buruk. Karena itu diperlukan pengembalian fungsi keluarga pada jalurnya untuk menghasilkan generasi antikorupsi dan secara efektif mencegah korupsi, kini dan nanti.

Kedua, sejak tahun 2014 hingga saat ini KPK melakukan program uji coba pembangunan budaya anti korupsi di Kelurahan Prenggan (Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta). Buku ini merupakan dokumen pembelajaran yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh KPK di daerah tersebut.

Atas dua pertimbangan di atas, buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran dan wawasan yang mudah dicerna tentang gambaran program, bagaimana melaksanakan program, dan mendorong Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk kreatif memulai gerakan sosial pemberantasan korupsi berbasis keluarga di daerahnya.



TUJUAN

Seluruh elemen bangsa pada hakikatnya mempunyai kepentingan bersama yaitu mewujudkan generasi yang berintegritas. Harapannya, akan terbangun sinergi yang berkelanjutan antara KPK, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan buku ini:

Pertama, KPK memaparkan pengalaman yang sedang KPK lakukan dalam menjalankan program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga.

Lewat pemaparan pengalaman ini, KPK berharap dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga di daerahnya masing-masing. Tentu saja, karena program ini berbasis budaya maka jenis kegiatan yang akan dihasilkan tidak akan sama persis antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan tidak membuat program yang sama sekali baru, tapi meng-insersi program ini sedekat mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang telah ada di masyarakat. Harapannya, program ini dijalankan dengan kesadaran dan keinginan penuh dari masyarakat, menjadi milik masyarakat, dan bertahan dalam jangka panjang. Dengan bahasa lain, program ini diharapkan menjadi program peradaban yaitu membentuk generasi anti korupsi di masa datang.

Kedua, memberikan gambaran dan wawasan yang mudah dicerna tentang esensi program, bagaimana melaksanakan program dan mendorong kepala daerah maupun pemangku kepentingan lain untuk kreatif memulai gerakan sosial pemberantasan korupsi berbasis keluarga di daerahnya.

Seluruh elemen bangsa pada hakikatnya mempunyai kepentingan bersama yaitu mewujudkan generasi yang berintegritas. Harapannya, akan terbangun sinergi yang berkelanjutan antara KPK, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini.

02

urgensi program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga

Bagian ini menjelaskan landasan teori
urgensi program pembangunan budaya anti
korupsi berbasis keluarga



URGENSI **PROGRAM**

Sejauh ini, upaya pencegahan korupsi pada organisasi pemerintahan dilakukan melalui perbaikan sistem dalam rangka menutup celah korupsi. Program-program meningkatkan integritas individu juga merupakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dan ditujukan kepada individu dan masyarakat luas. Upaya yang telah dilakukan tersebut belum cukup apabila tidak diikuti oleh rancangan sosial dan budaya yang mendorong tumbuhnya sikap mental anti korupsi di tengah masyarakat. Diperlukan suatu gerakan sosial yang mengakar, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang mengusung nilai anti korupsi, bukan hanya gerakan yang sifatnya jargon atau kampanye terbatas. Diharapkan gerakan sosial ini dapat mewujudkan budaya masyarakat Indonesia yang lebih berintegritas

Berkaitan dengan mewujudkan masyarakat yang berintegritas dan patuh terhadap hukum, DR. Alistair (2016) menyinggung bahwa terdapat dua model kepatuhan, yaitu kepatuhan instrumental dan kepatuhan normatif. Kepatuhan *instrumental* adalah 'reaksi yang diinisiasi oleh keinginan untuk menghindari hukuman atau supaya mendapatkan ganjaran yang positif' (Yagil 1998). Kepatuhan normatif adalah rasa tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum karena mencerminkan nilai-nilai seseorang (Tyler 1990)¹.

Dari kedua kepatuhan itu, kepatuhan normatif dirasa lebih efektif karena seseorang akan menaati hukum bukan karena takut hukuman, tapi karena ia merasa bahwa tindakannya dalam menaati hukum adalah tindakan yang benar.

Mewujudkan masyarakat yang berintegritas dan taat hukum, hendaknya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan normatif. Masyarakat yang patuh karena berbasis nilai (*value based*) menjadi landasan utama untuk gerakan pencegahan korupsi yang mengakar, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang oleh masyarakat (*Pre-emptive prevention*). Hal ini sejalan dengan regulatory pyramid berdasarkan teori dari Ayres and Braithwaite (1992), civil society prevention harus mendapatkan porsi yang besar dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum². Pendekatan ini dianggap tidak birokratis, sifatnya informal, berbiaya murah, dan daya jangkau pengaruhnya lebih luas.

Keluarga yang terdiri dari orangtua dan anak merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Orangtua merupakan pihak yang pertama dan utama dalam melakukan internalisasi nilai kepada anak. Ada keterkaitan yang sangat erat antara keluarga dan budaya menurut beberapa ahli.

Duvall dan Logan (1986) mendefinisikan keluarga sebagai sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Begitupun menurut Bailon dan Maglaya (1978), keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam kaitan dengan pencegahan korupsi, terdapat beberapa bahasan dan kesepakatan bahwa partisipasi keluarga dalam pencegahan korupsi menjadi penting diperhatikan.

Transparency International³ (2009) dalam papernya mengusulkan partisipasi keluarga menjadi satu dari enam strategi pencegahan korupsi. Selain itu USAID⁴ (2005)

1. Fildes, Alistair. 2016. *Normative compliance, legitimacy, and procedural justice*. Griffith University.
2. Bronitt, Simon. 2016. *The Regulatory Pyramid*. University of Queensland.
3. Labelle, H (2009). *Anti Corruption and the Sustainable Development Platform*. Transparency International's Paper on the the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Regional Seminar on Political Economy of Corruption in Manila
4. USAID (2005). *An Anticorruption Reader: Supplemental Sources on Transparency, Accountability, Prevention, Enforcement and Education*. Maryland: the IRIS Centre.

menekankan pentingnya peran pendidikan di dalam pencegahan korupsi. Pendidikan tersebut tidak terbatas pada pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan di dalam keluarga. Penanaman nilai-nilai moral yang menentang korupsi perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan di dalam keluarga atau di sekolah. Nilai-nilai moral anti korupsi merupakan elemen mendasar untuk mengubah masyarakat dari perilaku korup, meskipun hal ini tidak mudah untuk dicapai dan memerlukan waktu lama.

Lebih jauh lagi, Uslaner⁵ (2005) menyatakan bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan budaya. Budaya yang kental dengan nuansa “trust” sangat berkaitan dengan rendahnya korupsi. Sebaliknya, budaya yang “mis-trust” akan berkorelasi positif dengan tingkat korupsi. Oleh karenanya, membangun “trust” di dalam keluarga dan masyarakat merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Keluarga yang jujur, menurut Gong and Ma⁶ (2012), akan dapat membedakan hal-hal yang salah atau yang benar. Mereka tidak tergoda untuk melakukan korupsi, dan akan menghindari konflik kepentingan.

Saat ini negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang mendekati skor 10 (berdasarkan survei tahunan *Transparency International*), seperti Denmark, New Zealand, Finlandia, serta negara-negara OECD lainnya, telah memasukkan komponen keluarga ke dalam upaya pencegahan korupsi (Integritas dibangun melalui keluarga). Di Indonesia sendiri, kearifan budaya lokal di berbagai wilayah, pada dasarnya merupakan modal dasar dalam upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga.

Untuk itulah KPK memulai dengan melakukan Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga. KPK memandang bahwa program ini bukan pekerjaan yang sederhana, ini merupakan program jangka panjang yang membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. KPK berharap program ini dapat dilakukan di daerah-daerah lain dengan dukungan penuh dari masyarakat dan menjadi milik masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, KPK memilih intervensi diprioritaskan terhadap keluarga yang memiliki anak-anak usia 4-9 tahun. Hal ini dilakukan berdasarkan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg⁷ (1958), penanaman nilai paling efektif dilakukan kepada anak yang masih berusia 4- 9 tahun.

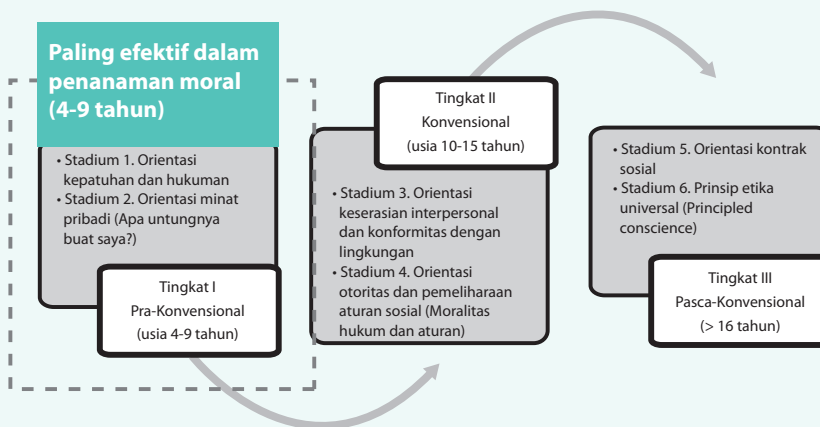
Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Tahapan tersebut dibuat saat ia belajar psikologi di *University of Chicago* penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Tahapan

5. Uslaner, E.M. (2005). *Trust Culture and Corruption*. Maryland: the IRIS Centre.

6. Gong, T. And Stephen K. Ma (2012) . *Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity*. New York: Routledge Asia Series.

7. John de Santo & Agus Cremers (ed). 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius

tersebut dibuat saat ia belajar psikologi di *University of Chicago* berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak psikologi di *University of Chicago* berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Ia menulis disertasi doktornya pada tahun 1958 yang menjadi awal dari apa yang sekarang disebut tahapan-tahapan perkembangan moral dari Kohlberg. Tahapan moral sebagaimana gambar berikut ini:



John de Santo & Agus Cremers (ed). 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral. Yogyakarta: Kanisius

1. Tingkat 1 Pra konvensional (usia 4-9 tahun)

Menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkah laku individu tunduk pada peraturan dari luar.

- **Stadium 1:** Individu memfokuskan diri pada orientasi kepatuhan dan hukuman memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri (akibat fisik). Anak berorientasi pada hukuman; Anak patuh karena takut dihukum. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang dirinya (*egosentris*).
- **Stadium 2:** Orientasi minat pribadi (Apa untungnya buat saya?). Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Anak menyesuaikan diri terhadap harapan sosial untuk memperoleh memperoleh penghargaan penghargaan. Contoh: Anak aktif sesuai anjuran guru agar dipuji.

Gambar 2

Teori Perkembangan Moral dari Lawrence Kohlberg

7. John de Santo & Agus Cremers (ed). 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral. Yogyakarta: Kanisius

2. Tingkat II konvensional (usia 10-15 tahun)

Umumnya ada pada remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat (bersifat konformitas)

- **Stadium 3:** Seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menyesuaikan dengan orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut. Penalaran tahap tiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas ada hanya untuk menghindari penolakan orang lain terhadap peran sosialnya.
- **Stadium 4:** Penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat (ketertiban). Penalaran moral dalam stadium empat lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap tiga; kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, maka ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik.

3. Tingkat 3 Pasca-Konvensional (> 16 tahun)

Prinsip-prinsip moral diterima atas kehendaknya-kehendaknya sendiri sendiri. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat 'hakekat diri mendahului orang lain' ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional.

- **Stadium 5:** Individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut 'memang anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak'? Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus harus diubah bila perlu demi terpenuhinya diubah bila

perlu demi terpenuhinya kebaikan kebaikan orang orang banyak. Anak patuh karena menghormati kepentingan bersama. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap lima.

- **Stadium 6:** Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan keadilan juga menyertakan keharusan untuk untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil.

Berdasarkan gambaran tersebut, KPK memutuskan untuk memprioritaskan intervensi kepada orangtua yang memiliki anak berusia 4-9 tahun. Program ini bertujuan agar anak dapat terinternalisasi nilai-nilai anti korupsi, utamanya adalah nilai kejujuran. Sehingga dapat tercapai generasi jujur di tahun mendatang dan menguatnya juga fungsi keluarga dalam menanamkan nilai kejujuran.

Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai upaya pengembangan segala potensi yang dimiliki masyarakat untuk mewujudkan budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Potensi tersebut antara lain adalah nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan menjadi pedoman masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Secara teoritis, hal ini dapat dirujuk dari pandangan Harisson & Huntington (ed.)⁸ (2006) tentang kebangkitan peran budaya dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik pada berbagai belahan dunia. Pada intinya, kemajuan sosial suatu bangsa dapat dibangun melalui kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai keseharian.

Setiap masyarakat memiliki seperangkat nilai dan norma yang dianut dan dibagi bersama oleh seluruh warganya. Nilai dan norma ini menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, tetapi dalam konteks tertentu berhubungan dengan sesuatu yang begitu abstrak, transeden, dan supreme. Hal ini karena nilai dan norma itu acapkali bersumber dari agama yang senyatanya sakral. Pada kenyataannya, agama memang memiliki peran yang signifikan dalam membangun kebudayaan suatu masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap agama yang diyakini bersumber dari wahyu Tuhan menjadi sistem nilai dan gagasan yang terinternalisasi dalam diri, serta landasan motivasional bagi perilaku individu dan masyarakat (Aziz, 2006)⁹.

Atas dasar tersebut, program pembangunan budaya anti korupsi ini merupakan program yang *embedded* (melekat) dengan nilai-nilai budaya setempat. Program harus

8. Harisson, Lawrence E. dan Samuel P. Huntington (Ed.). 2006. Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Jakarta: LP3ES.

9. Aziz, Abdul. 2006. Esai-esai Sosiologi Agama. Jakarta: Diva Pustaka, hal. 23.

dirancang sedekat mungkin dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Intervensi yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu berhasil pada daerah lain. Penting untuk dapat mengenal budaya setempat sehingga program ini bukanlah sesuatu program yang asing di masyarakat.

03

langkah-langkah membangun program

Bagian ini menjelaskan bagaimana menjalankan program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga di suatu daerah



LANGKAH-LANGKAH **MEMBANGUN PROGRAM**

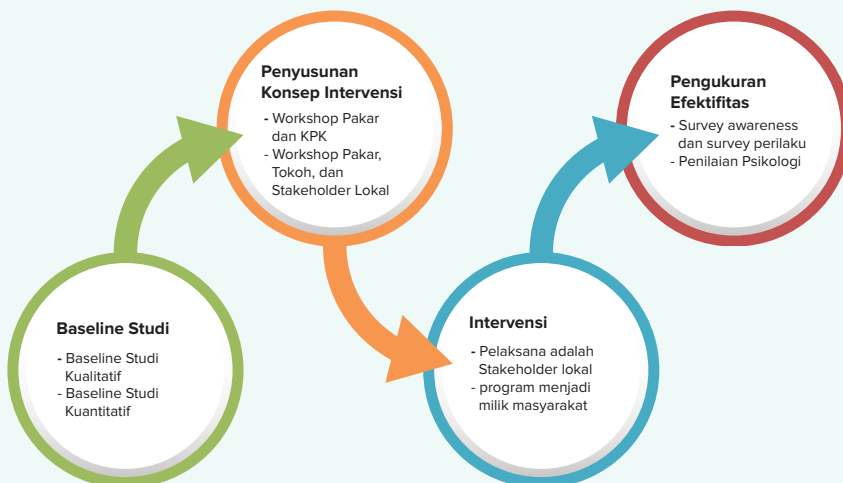
Untuk menuju penyebaran program yang lebih luas, KPK memandang perlu dilakukan pilot project program pencegahan korupsi berbasis keluarga terlebih dahulu. Berdasarkan diskusi dengan pakar intervensi sosial, bahwa untuk melakukan pilot project intervensi sosial sebaiknya dilakukan pada wilayah yang homogen¹⁰ agar intervensi dapat dilakukan secara lebih fokus dan terlihat hasilnya. Jika dilakukan pada daerah heterogen, program dikhawatirkan akan terlalu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan program.

10. Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi, geografi, alam, suka dan sebagainya. Richardson (1975) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (Budiharsono, 2001:14-15).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pilot project dilakukan di dua daerah yaitu Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY pada tahun 2012 dan Desa Adat Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Tahun 2015.

Di masa datang, KPK berharap program ini dapat diadopsi oleh unsur Pemerintah Pusat dan Daerah maupun masyarakat yang berkepentingan. Lembaga di Pemerintah Pusat yang relevan mengelola program ini diantaranya adalah Kementerian Sosial melalui program pemberdayaan sosial dengan ruang lingkup keluarga maupun BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) melalui Penyuluh Lapangan KB (PLKB) yang menyentuh langsung keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah merupakan pihak yang tepat mengelola program yang ditujukan kepada keluarga-keluarga di wilayahnya. Bahkan Organisasi Kemasyarakatan maupun Keagamaan seperti PKK; Dharma Wanita; Muhammadiyah melalui Aisyiyah; NU melalui Fatayat dan kelompok masyarakat lain yang langsung bersentuhan dengan keluarga juga bisa mengelola program ini. Target dari program ini adalah pada tahun 2045 terdapat generasi-generasi jujur dan anti korupsi.

Secara umum, berikut alur pelaksanaan program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga:



Program diawali dengan *Baseline Studi* yang merupakan *Family Studies*. *Baseline studi* bertujuan untuk dapat mengenali bagaimana kondisi keluarga terkait nilai kejujuran dan kondisi demografi, social, budaya yang mempengaruhi keluarga untuk menginternalisasi nilai tersebut. Selain itu, *baseline studi* ini merupakan tahapan penting yang dilakukan agar didapatkan landasan dan acuan dalam menyusun program konsep intervensi.

Gambar 1

Alur Pelaksanaan Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Sumber: KPK

Penyusunan konsep intervensi dilakukan dengan beragam cara tergantung kondisi dan kebutuhan dari lokasi masing-masing. Intinya, perlu pelibatan tokoh, komunitas, dan *stakeholder* utama yang berpengaruh dan menguasai tema keluarga, psikologi anak, intervensi sosial, demografi, dan pemerintah lokal. Pelibatan *stakeholder* kunci merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan penyusunan konsep intervensi.

Pada saat pelaksanaan intervensi, pelibatan seluruh unsur *stakeholder* juga menjadi bagian yang penting. Program ini harus diorientasikan agar dapat menjadi milik masyarakat, ada kesadaran bersama di masyarakat, ada keinginan dan kebutuhan bersama di masyarakat untuk mewujudkan generasi yang jujur. Harapannya, program dapat berjalan secara mandiri oleh masyarakat setempat, bukan berbasis proyek atau program kerja pemerintah.

Pengukuran paska intervensi dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi program. Keberhasilan atau kegagalan program akan terlihat dalam pengukuran ini. Hasil dari pengukuran akan digunakan sebagai bagian dari penyempurnaan intervensi yang akan dilakukan.

Penjelasan setiap tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tersendiri.



BASELINE **STUDI PROGRAM**

Tahap pertama adalah Baseline Studi Program. Baseline Studi ini dapat dilakukan penyelenggara program dengan memberdayakan akademisi maupun peneliti di perguruan tinggi setempat. Baseline studi bertujuan untuk dapat mengenali bagaimana kondisi keluarga terkait nilai kejujuran dan kondisi demografi, social, budaya yang mempengaruhi keluarga untuk menginternalisasi nilai tersebut.

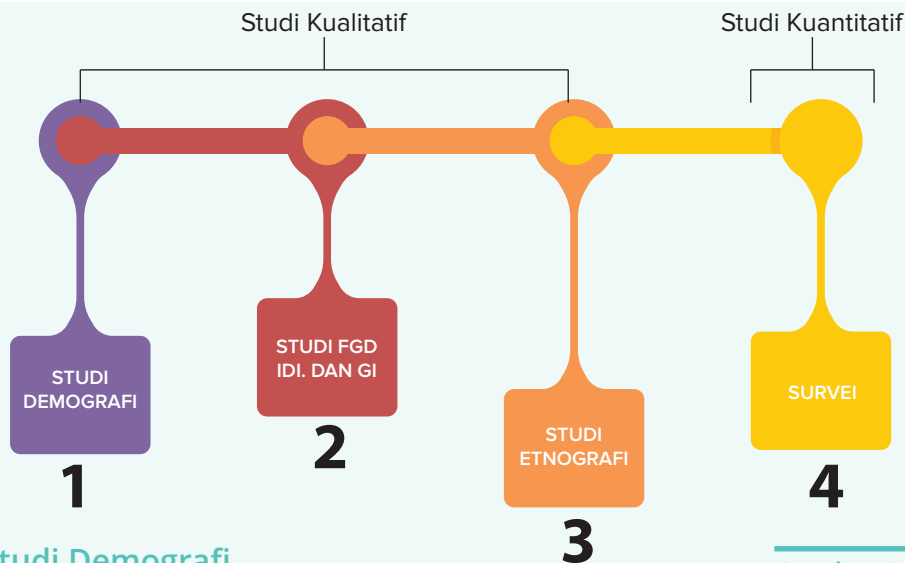
Pemahaman nilai budaya dalam lokasi intervensi ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan program. Misalnya, masyarakat Indonesia cukup banyak yang menjadikan nilai agama menjadi sumber inspirasi utama yang membangun nilai dan norma masyarakatnya. Nilai dan norma ini menjadi acuan, pedoman, sekaligus penggerak perilaku kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif. Seiring dengan perubahan sosial dan kultural yang berlangsung di masyarakat, nilai dan norma ini mampu bertahan dan bahkan mencerahi perubahan yang terjadi.

Dalam paradigma pendidikan konstruktivistik, nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat senantiasa diadaptasi sehingga proses konstruksi dan rekonstruksi nilai menjadi keniscayaan yang terus menerus berlangsung di sepanjang proses pendidikan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi terhadap nilai dan norma yang dianut suatu masyarakat menjadi langkah metodologis yang penting untuk menentukan pola pendidikan yang dipandang paling tepat pada masyarakat tertentu. Atas dasar itulah, identifikasi terhadap nilai dan norma yang terkait dengan budaya antikorupsi di lokasi terpilih perlu diketengahkan dalam program ini.

Program ini merupakan program yang mengusung kearifan lokal dari masing-masing daerah, karena intervensi program diharapkan dapat menginsersi ke dalam bagian dari program-program yang sudah ada di masyarakat dengan sedekat mungkin menyesuaikan dengan budaya setempat. Sehingga intervensi yang berhasil di suatu daerah, belum tentu tepat jika diadopsi pada daerah lainnya. Misalnya, masyarakat yang sangat religius, maka program akan menempel pada kegiatan-kegiatan religi yang biasa dilakukan masyarakat (dalam hal ini orangtua anak yang berusia 0-9 tahun). Begitupun terkait dengan alat peraga dan modul-modul akan banyak bermuatan religius.

Oleh sebab itu, program ini selalu dimulai dengan *Baseline* studi di Kabupaten/Kota terpilih untuk mengumpulkan informasi atau pemetaan tentang kondisi keluarga juga pengetahuan dan perilakunya mengenai korupsi dan nilai anti korupsi terutama kejujuran. Hasil *baseline* studi dijadikan referensi dalam penyusunan konsep intervensi Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga. *Baseline* studi ini dapat juga disebut dengan istilah *Family Studies*.

Pendekatan *baseline* studi ini menggunakan metodologi campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif dan berproses secara *linear* (hasil tahap satu akan menjadi input pada tahapan selanjutnya). Secara sederhana, berikut gambaran *baseline* studi yang dilakukan:



Studi Demografi

Studi demografi merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan lokasi terpilih yang lebih kecil (misalnya setingkat kelurahan) untuk intervensi. Studi demografi ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendapatkan informasi tentang kondisi sosial-budaya-politik masyarakat lokal sebagai dasar penentuan lokasi intervensi.
2. Mengidentifikasi penggerak utama pada stakeholder yang mempengaruhi keluarga,

Dalam studi demografi dilakukan dua metode untuk mendapatkan lokasi terpilih sebagai lokasi intervensi. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan lokasi terpilih untuk dijadikan lokasi intervensi:

1. Struktur pemerintahan yang tidak birokratis
2. Budaya pemerintahan yang melayani masyarakat
3. Kegiatan pembangunan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*community-based empowerment*), bukan berbasis proyek atau program yang bersifat sesaat/sementara
4. Memiliki lembaga swadaya masyarakat yang sangat aktif, seperti LPD, karang taruna, sekaa – sekaa sebagai penggerak masyarakat
5. Penduduk asli masih mendominasi, sehingga nilai-nilai kearifan budaya lokal masih nyata terlihat dan dijalankan
6. Kehidupan masyarakat yang toleran, pluralis, tidak individualis, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat
7. Memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani, yang dapat berperan dalam menggerakkan masyarakat.

Pada intinya, 7 kriteria tersebut ditentukan atas dasar pertimbangan praktis yaitu untuk kemudahan intervensi dalam hal berkoordinasi, bekerjasama, dan percepatan intervensi. Sehingga, 7 kriteria ini tidak mutlak, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Gambar 2

Tahapan *Baseline* Studi Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Sumber: KPK

Studi demografi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu melalui *Desk research* dan *In-depth interviews*. Dua teknik tersebut dipilih agar data yang terkumpul dapat divalidasi. Validasi data dilakukan dengan cara mencocokkan (*cross check*) informasi yang diperoleh dari kedua teknik pengambilan data tersebut.

Desk Research

Desk research dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan terkait informasi wilayah, kondisi masyarakat, dan budaya setempat dari berbagai sumber yang ada di *public domain*. *Desk research* ini dilakukan secara paralel dengan proses *in-depth interviews*.

In-depth Interviews

In-depth interviews dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan masyarakat, pimpinan atau tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya dan *stakeholder* yang relevan lainnya. Informasi atau data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam tersebut didukung dan di *cross-checked* dengan data-data sekunder yang diperoleh dari *desk research*. Jumlah *In-depth interviews* yang dilakukan dalam studi demografi ini menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan dari beragam informan untuk menjawab tujuan studi demografi. Narasumber dapat dipilih berdasarkan teknik *snowball* dari rekomendasi atau saran para narasumber yang telah diwawancarai terlebih dahulu.

Output dari Studi Demografi ini adalah:

1. Profil Kota/Kabupaten; Profil yang akan dijelaskan mulai dari struktur Pemerintahan yang ada di Kota/Kabupaten, profil kehidupan sosial, budaya dan adat masyarakat, profil ekonomi dan profil pendidikan. Profil ini detail diturunkan hingga profil masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di dalamnya.
2. Rekomendasi kecamatan dan kelurahan yang potensial dijadikan lokasi intervensi

Keseluruhan tahapan pada studi demografi ini sebaiknya dilakukan jika penyelenggara programnya adalah Pemerintah/Instansi Pusat. Namun, jika program ini dikelola oleh Pemerintah Daerah ataupun Organisasi Kemasyarakatan setempat, studi demografi yang dilakukan tidak perlu sekomprensif ini. Hal tersebut dikarenakan beberapa informasi utama terkait demografi sudah tersedia. Demikian juga jika lokasi intervensi ditetapkan berdasarkan penunjukan, maka studi demografi ini dapat disederhanakan.

Studi FGD/IDI/GI

Focus Group Discussion adalah cara untuk memperoleh informasi yang bersifat langsung dan tidak terstruktur dengan berbasiskan diskusi dalam kelompok. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang

sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998).

Menurut Henning dan Coloumbia (1990), diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topic diskusi saat itu. Interaksi diantara peserta merupakan dasar untuk memperoleh informasi. Peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, komentar maupun mengajukan pertanyaan. Diskusi dalam kelompok dilakukan dengan ciri-ciri informan yang relatif sama; kriteria kelas ekonomi yang relatif sama, pendidikan yang relatif sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya superioritas dan inferioritas di dalam kelompok.

Individual Depth Interview atau *Group Interview* adalah cara untuk memperoleh informasi yang bersifat langsung dan tidak terstruktur dengan berbasiskan orang per orang (individual atau langsung dalam satu group).

Studi FGD/IDI/GI dilakukan pada lokasi terpilih sesuai hasil Studi Demografi, sehingga pendalaman dapat spesifik dilakukan di lokasi yang akan diintervensi.

Tujuan:

1. Mengidentifikasi konsep-konsep, norma-norma, dan nilai-nilai dalam keluarga di wilayah setempat yang terkait dengan anti korupsi,
2. Mengetahui persepsi anggota keluarga terkait kejujuran dan korupsi.
3. Mengidentifikasi pola interaksi dan komunikasi di dalam keluarga,
4. Mengidentifikasi penggerak utama untuk internalisasi kejujuran pada keluarga dan penggerak utama pada *stakeholder* yang mempengaruhi keluarga,
5. Menentukan bagaimana kontribusi yang dapat dilakukan stakeholder/komunitas masyarakat terhadap Pemerintah Daerah untuk sama-sama berkontribusi terhadap pencegahan korupsi berbasis keluarga.
6. Mendapatkan informasi dan menganalisis program intervensi yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

FGD dilakukan terhadap beberapa kriteria berikut ini:

1. Kelompok keluarga (ayah, ibu, anak)
2. Kelompok pemerintahan/dinas
3. Kelompok berpengaruh (*diffuse group*); contohnya kelompok adat, kelompok LSM/NGO, kelompok guru, kelompok komunitas, dst.

Jumlah group pada masing-masing kriteria, dapat menyesuaikan dengan heterogenitas kelompok masyarakat di lokasi setempat.

Indepth interview atau *group interview* dilakukan terhadap:
1. Kelompok anak: usia 4-9 tahun
2. Tokoh *premium level*: Bupati, tokoh seni/budayawan, tokoh adat, dst

Tabel 2
Topik yang digali dalam FGD/IDI/GI Kelompok Keluarga

Berikut contoh topik yang digali dalam FGD/IDI/GI sesuai dengan kriteria kelompok:

Topik Diskusi	Sub-Topik Diskusi	Pertanyaan Riset
Seputar Keluarga	Konsep penting dalam keluarga	1. Apa konsep-konsep utama yang ada di dalam keluarga?
		2. Apa nilai-nilai yang ingin dibangun oleh Ayah dan Ibu dalam
		3. Nilai-nilai apa saja yang telah dan akan di-internalisasikan oleh Ayah dan Ibu kepada anak?keluarga?
		4. Bagaimana keluarga memaknai konsep kejujuran dalam kehidupan sehari-hari?
	Pola Otoritas	1. Siapa pengambil keputusan utama dalam keluarga terutama dalam kaitan dengan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai?
		2. Siapa yang mempengaruhi (influencer)?
	Pembagian Peran	1. Bagaimana pembagian tugas antara Ayah dan Ibu dalam pendampingan anak-anak sehari-hari?
		2. Bagaimana dengan pembagian peran dalam konteks ekonomi?
		3. Bagaimana pula pembagian peran untuk hal lainnya seperti sosialisasi?
	Pola Pengasuhan	1. Apakah Ayah/Ibu melakukan sosialisasi?
		2. Bagaimana dengan re-sosialisasi?
		3. Mengapa? Bagaimana?
	Penempatan sosial dan identitas sosial anak dimasa depan	1. Apa harapan orang tua terhadap anak di masa depan?
		2. Posisi sosial seperti apa yang dibayangkan oleh orang tua untuk anaknya di masa depan?
	Kegiatan Bersama dan Bentuk Komunikasi	1. Apa saja kegiatan yang dilakukan bersama?
		2. Bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya?
		3. Bagaimana penilaian orang tua terhadap kualitas komunikasi mereka saat ini?
Topik Diskusi	Sub-Topik Diskusi	Pertanyaan Riset
Seputar Korupsi dan Anti Korupsi	Pengetahuan tentang Korupsi	1. Bagaimana pemahaman keluarga terhadap konsep korupsi?
		2. Bagaimana orang tua melihat hubungan antara konsepsi korupsi di masa datang dengan perilaku anak di masa sekarang?
	Pencegahan Korupsi	1. Apa kontribusi yang dapat disumbangkan oleh keluarga dalam upaya pencegahan korupsi?
		2. Apa pendapat keluarga tentang upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga? Seberapa yakin akan konsep ini?

Sumber: KPK

Tabel 3 berikut menggambarkan topik yang digali dalam FGD pada kelompok pemerintahan/dinas dan kelompok berpengaruh dengan mengambil contoh penelitian yang dilakukan di Kabupaten Badung-Bali.

Topik Diskusi	Sub-Topik Diskusi	Pertanyaan Riset
Seputar Budaya Lokal pada Lokasi yang akan di Intervensi	Budaya Lokal	1. Bagaimana ketiga kelompok tersebut melihat Budaya Lokal pada Lokasi yang akan diintervensi? pendidikan dan internalisasi nilai-nilai?
		2. Bagaimana halnya jika dibandingkan dengan budaya provinsi ini secara umum?
		3. Bagaimana dengan masyarakatnya?
		4. Apa ciri khas atau ciri penting dari Budaya Lokal pada Lokasi yang akan diintervensi?
	Pengalaman Mendorong Perubahan atau Internalisasi Nilai	1. Bagaimana pengalaman narasumber di setiap kelompok dalam mendorong perubahan di Budaya Lokal pada Lokasi yang akan diintervensi?
		2. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan di daerah lainnya di provinsi ini?
		3. Adakah perbedaannya? Bagaimana perbedaannya dengan daerah lain?
		4. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk melakukan hal tersebut?
	Pengetahuan Tentang Korupsi	1. Bagaimana konsep korupsi yang dipahami?
		2. Bagaimana narasumber di setiap kelompok diskusi melihat ketertarikan antara keluarga dengan pencegahan korupsi?
		3. Bagaimana narasumber melihat keterhubungan perilaku anak di masa depan dengan konsepsi korupsi?
	Seputar Korupsi dan Anti Korupsi	1. Apa yang narasumber bayangkan tentang kontribusi yang dapat dilakukan oleh tiap kelompok dalam upaya pencegahan korupsi?
	Pencegahan Korupsi	1. Apa pendapat narasumber tentang peran atau kontribusi keluarga dalam upaya pencegahan korupsi?

Tabel 3

Topik yang digali dalam FGD/IDI/GI pada kelompok pemerintahan/dinas dan kelompok berpengaruh

Output dari Studi FGD/IDI/GI ini adalah:
 Rekomendasi bagi pembuatan atau penajaman *instrument survey*
 Rekomendasi bagi penyusunan konsep intervensi

Studi Etnografi

Menurut Spradley (2006)¹¹ bahwa etnografi merupakan analisis makna budaya, berbagai interpretasi, dan pandangan tentang budaya yang sedang dipelajari. Tujuan dari dilakukannya studi etnografi adalah:

1. Mendapatkan serinci mungkin gambaran budaya setempat; bahasa yang digunakan, simbol-simbol yang penting, nilai-nilai yang dipegang teguh, tradisi yang masih dijalankan, pola-pola masyarakat, komunitas-komunitas dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, dst.
2. Hasil penelitian etnografi ini akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program intervensi pemba-

11. Spradley, James P. 2006. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

ngunan budaya anti korupsi berbasis keluarga di lokasi intervensi.

Oleh karena itu, metode utama yang digunakan dalam studi etnografi adalah observasi partisipan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Cara kerja operasional dari kedua metode tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi (*participant observation*) merupakan cara untuk mengamati suatu kegiatan yang sedang berlangsung, di mana peneliti terlibat langsung pada situasi sosial tersebut¹². Observasi dilakukan terhadap berbagai elemen kehidupan masyarakat lokasi atau kelurahan terpilih sesuai hasil studi demografi, seperti aktivitas pendidikan, perekonomian, keagamaan, pertemuan warga, kesenian, dan kehidupan sehari-hari. Observasi dilakukan terhadap beberapa keluarga terpilih yang menjadi subjek observasi partisipasi. Keluarga yang terpilih tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:

1. Keluarga tersebut memiliki struktur anggota keluarga lengkap, yaitu suami, isteri, dan anak yang berusia 4 – 9 tahun;
2. Keluarga tersebut tidak pernah tersangkut kasus hukum, sosial, dan adat.
3. Keluarga tersebut terlibat aktif dalam aktivitas kemasayarakatan, social, keagamaan pada lokasi terpilih.
4. Keluarga yang dipilih mewakili kriteria utama masyarakat setempat (bisa berdasarkan suku, golongan, agama, dst yang menjadi ciri dari lokasi setempat dan kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap program intervensi)

Observasi partisipasi akan dilakukan oleh 2 (orang) asisten peneliti yang akan hidup dan tinggal bersama (*live in*) dengan keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria tersebut selama (30 hari) penuh, dan 2 orang peneliti yang akan *live-in* selama 30 hari dalam keluarga yang sama, namun melakukan tugas yang berbeda.

Dipilihnya keluarga yang mempunyai anak berusia 4 – 9 karena pada usia ini merupakan usia paling potensial dalam pembentukan karakter anti korupsi dalam diri anak. Hal ini mengafirmasi “teori tabularasa” yang digagas John Locke¹³ bahwa jiwa anak-anak ibarat seperti kertas putih, tergantung bagaimana cara orang tua dan lingkungan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepadanya. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan jati diri anak yang berbudi pekerti luhur harus dilakukan melalui proses pendidikan keluarga dan lingkungan yang lebih menekankan pada kepatuhan dan pembiasaan untuk melakukan yang baik (susila). Dalam konteks pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, penanaman karakter dan budi pekerti pada anak usia dini menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Khusus terkait dengan

12. Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

13. Baihaqi, Mlf. 2007. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan*. Bandung: Nuansa

observasi dalam aktivitas pendidikan, fokus observasi adalah pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan sekolah dasar (SD), dan pendidikan di rumah tangga. Adapun elemen-elemen kegiatan yang akan diobservasi dalam studi etnografi ini dapat dilihat pada Tabel 4.

No	Elemen kegiatan yang akan diobservasi partisipatif
1	Aktivitas sehari-hari (daily activity) keluarga yang menjadi subjek observasi dengan cara tinggal dan hidup bersama (live in) keluarga tersebut selama 1 bulan (30 hari) penuh
2	Pola hubungan dan komunikasi antara anggota keluarga inti (batih)
3	Pola hubungan dan komunikasi antara anggota keluarga inti (batih) dengan keluarga besar (extended family)
4	Keterlibatan keluarga dalam aktivitas sosial, seni, budaya, dan keagamaan masyarakat di lingkungan sekitarnya
5	Intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak-anak
6	Intensitas komunikasi antara keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi, dll.) dengan anak-anak dari keluarga yang diobservasi
7	Pola hubungan dan komunikasi anak-anak dengan kelompok bermain mereka (peer group)
8	Kegiatan keagamaan warga.
9	Kegiatan sosial warga (PKK, Posyandu),
10	Kegiatan kesenian warga.
11	Kegiatan pendidikan: PAUD, SD, dan pasraman.
12	Berbagai layanan publik yang ada.
13	Berbagai kegiatan perekonomian warga.
14	Aktivitas sehari-hari kantor pemerintahan desa/kelurahan.
15	Kegiatan-kegiatan terkait lainnya.

Tabel 4
Elemen kegiatan yang akan diobservasi partisipatif

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan aspek fundamental dalam penelitian etnografi, yaitu kukuhnya hubungan antara peneliti dan responden dan hasrat untuk memahami yang lebih daripada sekadar menjelaskan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti akan hidup menetap di tengah-tengah keluarga yang ditetapkan sebagai fokus atau subyek penelitian selama empat minggu. Kegiatan wawancara mendalam ini akan dilaksanakan terhadap anggota keluarga batih (ayah, ibu, dan anak-anak), dan anggota keluarga luas (*extended family*) (kakek, nenek, paman, bibi), serta para informan kunci (*key informant*) yang dipandang memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat terkait dengan pencegahan korupsi. Batas usia anak-anak yang akan diwawancarai sesuai dengan target intervensi adalah anak-anak yang berusia 4-9 tahun. Agar diperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian dan wawancara berjalan lancar, maka selama proses wawancara berlangsung harus ada pendampingan dari orang tuanya.

14. Spradley, James P. 2006. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian maka diperlukan pedoman wawancara. Dalam teknik wawancara mendalam, pedoman wawancara tidak bertujuan untuk mengarahkan hasil wawancara, tetapi untuk memelihara agar wawancara benar-benar produktif dan dapat menggali informasi secara menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara disusun berdasarkan hasil studi demografi, *Focus Group Discussion* (FGD), *Group Interview* (GI), *Individual Depth Interview* (IDI), dan tujuan penelitian ini.

Dalam studi etnografi ini, wawancara mendalam akan difokuskan pada peranan keluarga dalam internalisasi nilai anti korupsi. Walaupun demikian, mengingat pendidikan keluarga juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sehingga akan dilakukan wawancara mendalam kepada elit-elit tradisional dan formal yang nantinya akan dianalisis sebagai data pendukung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, langkah-langkah wawancara mendalam dilakukan berdasarkan panduan atau instrument yang disusun (terdapat dalam lampiran).

Berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam akan dideskripsikan secara naturalistik-kualitatif dan dimaknai sesuai perspektif teoretis yang koheren dan berkorespondensi dengan tujuan umum studi ini, yaitu Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Menurut Geertz¹⁵ (1973) analisis deskripsi mendalam (*thick description*) melalui dua langkah interpretasi, yaitu '*thinking and reflecting*' ('memikirkan dan merefleksikan') serta '*thinking of thought*' ('memikirkan sebuah pemikiran'). Artinya, interpretasi merepresentasikan berbagai macam penyegaran pemikiran yang ide-idenya berasal dari bacaan terdahulu, beberapa perspektif teoretis tertentu, dan konsep-konsep yang dinyatakan informan. Implikasinya bahwa interpretasi tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi menjadi rangkaian tidak terputus dari ide-ide dan perspektif teoretis tertentu.

Output dari Studi Etnografi ini adalah:

1. Rekomendasi bagi pembuatan atau penajaman *instrument* survei
2. Rekomendasi bagi penyusunan konsep intervensi

Survei

Tahapan baseline studi yang terakhir adalah tahapan penelitian kuantitatif yaitu survey dengan pendekatan *probabilistic sampling* atau *Random Sampling*. Pada metode ini, pemilihan responden dilakukan seobyektif mungkin; setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancarai. *Random sampling* disarankan untuk dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan wilayah tempat tinggal populasi. Sehingga data akhir dapat dianggap merupakan representasi total populasi.

15. Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.

Probabilistic/random sampling dengan wilayah tempat tinggal populasi sebagai unit sampling, dilakukan untuk mendapatkan data yang representatif: menggambarkan populasi atau dapat diproyeksikan pada keseluruhan populasi. *Sampling error* atau *margin of error* dapat diperhitungkan dengan derajat kepercayaan yang dapat dipertanggung-jawabkan; atau dengan kata lain, deviasi data terhadap kondisi populasi yang sesungguhnya, dapat diperkirakan dalam derajat kepercayaan tertentu. *Simple random sampling* digunakan untuk mendapatkan area Kelurahan, RW dan RT terpilih, berdasarkan data Podes dari BPS.

o Responden dalam keluarga terpilih

Responden dalam keluarga terpilih adalah Ayah, Ibu, Anak, ini adalah satu paket. Dalam satu keluarga terdapat tiga responden dengan tiga kuesioner. Hal ini dikarenakan unit analisis dalam survey ini adalah keluarga bukan individu. Sehingga, sebagian besar jawaban akan dianalisis sebagai jawaban keluarga, bukan individu (contoh kuesioner dan tabel analisis ada dalam lampiran).

o Pemilihan responden untuk diwawancarai

Terdapat tiga kriteria keluarga yaitu tipe A, tipe B dan tipe C dengan pemilihan responden sebagai berikut:

1. **Keluarga tipe A:** Dari 1 (satu) keluarga terpilih, akan dipilih 2 (dua) responden yang diwawancarai, yaitu Ayah dan Ibu yang memiliki anak yang berusia 4 - 9 tahun). Observasi terstruktur dilakukan untuk anak yang berusia 4 - 9 tahun.
2. **Keluarga tipe B:** Dari 1 (satu) keluarga terpilih, akan dipilih 3 (tiga) responden yang diwawancarai, yaitu Ayah, Ibu dan anak (salah satu anak yang berusia 10 - 15 tahun).
3. **Keluarga tipe C:** Dari 1 (satu) keluarga terpilih, akan dipilih 3 (tiga) responden yang diwawancarai, yaitu Ayah, Ibu dan anak (salah satu anak yang berusia > 15 tahun dan belum menikah).

Ketiga tipe keluarga ini tetap diambil sebagai dasar perbandingan, meskipun yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan intervensi adalah keluarga tipe A.

Output dari Survei ini adalah:

1. Terdapat data *statistic* tentang kondisi keluarga di lokasi intervensi
2. Rekomendasi bagi penyusunan konsep intervensi



INTERVENSI **PROGRAM**

Hasil dari baseline studi menjadi dasar yang sangat penting dalam penyusunan program-program terkait intervensi di lokasi terpilih. Intervensi secara langsung dalam fungsi-fungsi keluarga, khususnya pengasuhan anak, memerlukan sebuah rancangan dan rekayasa yang terencana dengan baik (well planned), meliputi semua aspek pengasuhan (complex) dan memungkinkan bagi komunitas melaksanakannya dengan kekuatannya sendiri (mandiri, independen).

Sasaran program adalah anak-anak berusia 0 sampai 9 tahun, inilah range usia yang meliputi sekaligus usia bayi, balita dan usia sekolah dasar. Kisaran usia ini dari sudut pandang psikologi memiliki signifikansi tumbuh kembang:

- Pembentukan pola berfikir, yakni tahapan pertumbuhan kognitif yang dicirikan dengan perkembangan logika berfikir, kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*), mulai berfikir abstrak serta pengambilan kesimpulan secara induktif.
- Kisaran usia tersebut juga ditandai dengan perkembangan moral menjejak tahapan *conventional morality*. Penalaran moralitas konvensional bermakna penerimaan anak secara perlahan terhadap standar masyarakat mengenai benar dan salah, konformitas terhadap peraturan sosial, serta dimulainya kesadaran mengenai konsekuensi melanggar peraturan hingga manfaat yang diterima diri karena menuruti peraturan.

Anak tidak berada di ruang hampa, selain orangtua perlu juga diperhatikan lingkungan yang akan berhubungan dengan anak. Sehingga dalam menyusun program intervensi ini setidaknya terdapat 12 hal yang penting untuk diperhatikan:

1. Nama program:

Hasil penelitian KPK menunjukkan bahwa 'korupsi' masih merupakan diskursus asing komunikasi massa di masyarakat, jauh dari domain keluarga. Sehingga, nama program tidak harus pencegahan korupsi berbasis keluarga, namun bisa diganti dengan program penguatan internalisasi nilai kejujuran berbasis keluarga. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

2. Pengertian Jujur:

Pengertian jujur dalam program ini adalah menyampaikan yang sebenarnya dan bertindak benar.

3. Kategorisasi usia anak:

Kategorisasi usia anak dalam program ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- Usia 0-3 tahun; akan difokuskan dengan melakukan penguatan hubungan orangtua dan anak (menciptakan kedekatan dan kepercayaan anak terhadap orangtua).
- Usia 4-6 tahun; Kelas PAUD-TK
- Usia 7-9 tahun; Kelas 1-4 SD

4. Indikator nilai:

Rentang Usia 4-6 Tahun

12 hal yang penting untuk diperhatikan:

1. Nama program
2. Pengertian Jujur
3. Kategorisasi usia anak
4. Indikator nilai
5. Peranan orangtua
6. Materi yang diberikan untuk orangtua
7. Panduan teknis orangtua melakukan internalisasi nilai jujur
8. Pola penanaman nilai
9. Peran keluarga besar
10. Peran sekolah dan komunitas
11. Kondisi anak
12. Manajemen relawan

No	Indikator Jujur yang akan diintervensi KPK	Keterkaitan dengan nilai karakter lainnya				
		Jujur sebagai Nilai utama	Tanggung jawab	Keberanian	Kepedulian	Disiplin
1.	Anak mengerti mana milik pribadi dan milik bersama,	✓	✓			
2.	Meminta izin jika akan meminjam milik orang lain,	✓	✓		✓	
3.	Anak terbiasa mengatakan sesuatu yang benar – benar terjadi	✓		✓		
4.	Mengakui kesalahan	✓	✓	✓		
5.	Meminta maaf bila salah dan memaafkan teman yang berbuat salah,	✓	✓	✓		
6.	Tidak menukar dengan milik orang lain tanpa izin,	✓	✓			
7.	Tidak berlaku curang	✓	✓	✓		

Rentang Usia 7-9 tahun

Sesuai perkembangan usia 7-9 tahun, anak sudah bisa membedakan barang milik pribadi dan milik orang lain, sehingga *indicator* perilaku tersebut tidak lagi dijadikan target capaian. Perilaku lainnya yang akan dijadikan *indicator* adalah perilaku tidak mencontek, kemampuan untuk menjalankan amanah atau pesan yang diamanatkan (dapat dipercaya) serta menepati janji.

No	Indikator Jujur yang akan diintervensi KPK	Keterkaitan dengan nilai karakter lainnya				
		Jujur sebagai Nilai utama	Tanggung jawab	Keberanian	Kepedulian	Disiplin
1.	Dapat dipercaya	✓	✓			
2.	Meminta izin jika akan meminjam milik orang lain	✓	✓		✓	
3.	Anak terbiasa mengatakan sesuatu yang benar – benar terjadi	✓		✓		
4.	Mengakui kesalahan	✓	✓	✓		
5.	Meminta maaf bila salah dan memaafkan teman yang berbuat salah,	✓	✓	✓		
6.	Tidak menukar dengan milik orang lain tanpa izin,	✓	✓			
7.	Tidak berlaku curang	✓	✓	✓		
8.	Tidak mencontek	✓	✓			✓
9.	Menepati Janji	✓	✓		✓	

5. Peranan orangtua:

- Ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Khusus dalam konteks anak berusia 0-9 tahun, keutamaan kehadiran ibu bermakna sebagai sumber pembelajaran (*lesson source*), lebih dari ayah dan keluarga besar. *Lesson source* juga bermakna bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh ibu berlangsung dalam aliran cinta kasih yang memenuhi setiap interaksi dan perlakuan.
- Ayah lebih berperan sebagai *content source*, yakni ayah sebagai orangtua yang menyampaikan ilmu pengetahuan, informasi kehidupan serta menjadi 'teman berbicara'. Kesibukan ayah dan sedikitnya waktu yang dihabiskan oleh anak bersama ayah, bukan berarti peranan ayah menjadi kurang berarti, justru peranan ayah dan interaksi dengan ayah bersifat sangat menonjol dan menjadi kenangan yang bermakna. Ayah juga berperan sebagai supervisor utama dari kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diutamakan keluarga.

6. Materi yang diberikan untuk orangtua:

Orangtua harus menjadi orangtua yang cakap untuk dapat menginternalisasi nilai kejujuran ini. Materi yang akan diberikan untuk menjadi orangtua cakap adalah :

- *Knowledge*
Tahapan materi yang harus diberikan pada sesi parenting/pertemuan-pertemuan adalah :
 - Orangtua mengetahui peran dan fungsi sebagai orangtua
 - Orangtua mengetahui orientasi/ visi keluarga dan visi orangtua untuk mendidik anak jujur
 - Orangtua mengetahui dasar-dasar cara mendidik, termasuk cara mendidik anak jujur
 - Orangtua mengetahui konsep kejujuran
- *Skill/Keterampilan*
Skill/keterampilan diajarkan untuk mendukung orangtua dalam menjalankan peran dan fungsi orang tua secara optimal dan mendukung internalisasi nilai jujur kepada anak. Keterampilan yang harus diberikan adalah :
 - Komunikasi antara ayah dan ibu, serta komunikasi orangtua kepada anak
 - Melatih orangtua untuk dapat melatih anak mandiri --> melatih hard skill anak
 - Melatih orangtua untuk meningkatkan kecakapan hidup anak (anak sebagai *problem solver*) --> melatih *soft skill* anak
 - Melatih orangtua untuk dapat membangun konsep diri anak
 - Melatih orangtua untuk mengelola emosi diri

Catatan : Skill/keterampilan yang diajarkan bukan merupakan tahapan, sehingga dapat dimulai dari urutan manapun.

sendiri, serta mengelola emosi saat menghadapi anak

- Melatih keterampilan dalam mendongeng, menggunakan media (video), menceritakan kembali isi video

Adapun hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan sesi parenting/pertemuan-pertemuan tersebut orangtua harus menilai potensi dirinya dalam *form self assessment* dengan cakupan :

- Bagaimana selama ini hubungan antara orangtua dengan anak
- Afeksi (Dalam sehari berapa kali orang tua memeluk anak ?, menonton bersama? bermain bersama ?)
- Pujian (Apakah bentuk pujian yang sering orangtua berikan kepada anak?, seberapa sering orangtua memberikan pujian?)
- Apakah kata-kata yang sering orangtua gunakan saat anak melakukan tindakan yang salah/tidak jujur
- Apakah cara yang digunakan orangtua saat anak melakukan tindakan yang salah/tidak jujur
- Dalam 1 hari, berapa lama orangtua melakukan interaksi yang intensif dengan anak?
- Seberapa sering orangtua membacakan buku cerita kepada anak?
- Seberapa sering orangtua berdiskusi dengan anak?
- Identitas sosial (Apakah kekhawatiran orangtua terhadap masa depan anak?)
- Bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini antara orangtua dan anak

7. Panduan teknis orangtua melakukan internalisasi nilai jujur:

Orangtua-orangtua yang sudah menerima pendidikan sebagai orangtua cakap, dapat memulai menginternalisasi nilai kejujuran kepada anak dengan menggunakan panduan teknis dibawah ini:

A. Orientasi Keluarga

1. Orangtua menyusun hierarki nilai keluarga
2. Memahami seluk beluk kejujuran
3. Menyusun batas-batas perilaku

Apakah perilaku yang diharapkan	Apakah perilaku yang tidak diharapkan	Konsekuensi atas perilaku yang tidak diharapkan	Penguatan atas perilaku yang diharapkan

B. Pembiasaan untuk mendukung konsistensi orientasi (apa yang harus dibiasakan dan bagaimana caranya), salah satu cara dengan menggunakan APE (Alat Peraga Edukasi)

- Saat anak BATITA
 - *Story Telling* membahas film
 - Aplikasi batas perilaku sampai menjadi *habit*
- Usia anak 4-6 tahun
 - Kisah masa kecil Ayah/Ibu
 - *Habit Formation*
- Usia 7-9 tahun
 - Kisah masa kecil
 - Diskusi film
 - *Habit Formation*

C. Media untuk memudahkan orientasi, pembiasaan, keteladanan dan refleksi

- Menonton film Ipin Upin tentang pementasan dongen gembala yang berteriak serigala
- Mendiskusikan cerita/kisah nyata (Kejujuran seorang office boy (Agus Chaerudin) dalam mengembalikan uang yang dia temukan)
- Buku cerita
- Permainan
- Lagu-lagu

D. Keteladanan

E. Refleksi

Untuk lebih memudahkan orangtua menginternalisasi nilai jujur, orang tua akan dibekali tips dan trik untuk pembiasaan anak berperilaku jujur. (*Form* terlampir)

8. Pola penanaman nilai:

- Hasil penelitian menunjukkan pola penanaman nilai kejujuran lebih menekankan *reward and punishment* bukan komunikasi dialogis. Meskipun semakin tinggi pendidikan orangtua pola komunikasi dialogis lebih sering dilakukan. Membangun karakter kejujuran hendaklah berdasarkan pemaknaan sang anak, bukan sekedar paksaan dan kepatuhan yang bersifat semu. Namun menjadi tantangan bagi program ini adalah bahwa pola komunikasi dialogis terkait penanaman nilai ini membutuhkan kreativitas untuk mengimplementasikannya dalam dialog yang mudah dipahami.
- Nilai kejujuran membutuhkan *role modeling* yang konsisten dan konkrit. *Role model* ini lebih efektif jika dilakukan langsung oleh orangtua dan didukung oleh *role model* dari tokoh setempat. Sehingga, anak dapat melihat langsung bagaimana implementasi dan contoh dari nilai kejujuran.

9. Peran keluarga besar:

Indonesia didominasi oleh pola *extended family* (keluarga besar), namun keluarga besar ini tidak berperan dalam sosialisasi nilai. Hal ini dikarenakan tidak adanya *role expectation* dan substansi yang tidak terstruktur. Keluarga besar lebih berperan dalam; memberikan dukungan kasih sayang, mengingatkan perilaku buruk, kebersamaan dalam menik-

mati waktu luang atau waktu santai, dan pengawas saat ayah dan ibu sedang bekerja (terutama biasa dilaksanakan oleh kakek/nenek/om/tante).

10. Peran sekolah dan komunitas:

Sekolah dan komunitas memiliki peran aktif dalam penanaman nilai, syaratnya harus terbentuk adanya *sense of community* untuk menjadikan generasi setempat menjadi generasi yang jujur dan berintegritas. Dengan adanya *sense of community* ini maka akan terbentuk *social pressure* untuk bersama-sama seluruh elemen masyarakat menciptakan generasi yang jujur dan berintegritas.

11. Kondisi anak:

Keberhasilan program ini sangat ditentukan dari:

- Keaktifan anak dalam megkonstruksi nilai-nilai kejujuran
- Bagaimana sekolah dan komunitas membangun *community traditions conventions* (kesepakatan bersama tentang tradisi kejujuran) dan *social pressure* yang diciptakan
- Kelompok-kelompok bermain anak yang sportif dan jujur
- Tokoh-tokoh panutan di lingkungan komunitas yang bersikap jujur dan patut diteladani

12. Manajemen relawan:

Relawan dalam program ini dapat dikategorikan dalam dua tipe:

A. Relawan organisator adalah relawan yang membantu implementasi program di tingkat keluarga. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, relawan organisator harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan. Relawan organisator setidaknya memiliki tugas sebagai berikut:

- Mengorganisir pelaksanaan berbagai kegiatan yang digariskan oleh kebijakan program, khusus untuk tingkat RT dan RW
- Mengimplementasikan program pendidikan keluarga jujur berintegritas, baik sebagai narasumber tambahan maupun mengorganisir pelaksanaan kegiatan
- Melakukan monitoring penerapan nilai-nilai kejujuran di keluarga berbasis RT
- *Updating data*
- Para relawan organisator bersama-sama menyusun laporan tahunan untuk PKK, Kelurahan, dan KPK

Relawan organisator menyentuh keluarga dengan dua cara:

- Mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan keluarga sasaran (berbasis RT) dengan materi pengasuhan anak 0-9 tahun, sesuai dengan garis kebijakan program.
- Melakukan *monitoring* terhadap perilaku orangtua dan anak, secara berkala, langsung ke rumah keluarga sasaran (*family visit*). Relawan organisator membuat data kunjungan, sehingga data kunjungan lebih

merata dan tepat sasaran. *Family visit* ini dapat juga mengajak relawan ahli.

- B. Relawan ahli adalah relawan memberikan masukan kepada keluarga mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, sesuai kesepakatan program. Relawan ahli terdiri dari tokoh-tokoh agama, sosial, budaya setempat, serta nara-sumber ahli tingkat provinsi dan nasional. Relawan ahli dapat memantau langsung di tengah keluarga, perilaku dan pemahaman anak-anak mengenai kejujuran dan nilai-nilai lainnya.

Proses penyusunan program ini melibatkan pakar (akademisi, praktisi) dan stakeholder terkait (tokoh lokal, komunitas lokal, dst). KPK melakukan langkah-langkah berikut dalam proses penyusunan intervensi program:



Stakeholders (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan) yang akan melaksanakan program bisa mengadopsi langkah yang dilakukan KPK (sebagian atau keseluruhan) atau bahkan cukup mengadopsi output dari langkah yang dilakukan KPK tersebut.

Gambar 3
Proses Penyusunan
Intervensi Program

Tahap 1 Diskusi Pakar:

Tahapan ini menjadi tahapan yang penting dalam penyusunan program intervensi. Hasil dari *baseline* studi diberikan kepada pakar untuk dilakukan *review* dan diberikan konsep atau *draft* masukan dalam penyusunan program intervensi. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan pakar untuk mengeksplorasi konsep atau *draft* masukan yang telah diberikan. Sebaiknya pakar terdiri dari beberapa latar belakang keilmuan; psikologi anak, psikologi keluarga, psikologi intervensi social, antropologi, sosiologi, komunikasi, dst. *Review* dan masukan dari pakar juga haruslah dalam kerangka pembuatan LFA.

Sumber: KPK

Output dari tahap diskusi pakar adalah:

1. Konsep umum intervensi program
2. Draft LFA program

Tahap 2 *Workshop* praktisi dan *stakeholder* lokal:

Output dari tahap 1 (*review* dan masukan pakar) akan menjadi acuan dalam melakukan *workshop* dengan praktisi dan *stakeholder* lokal. Oleh karena program ini diarahkan untuk dapat menjadi program milik masyarakat, maka praktisi dan *stakeholder* lokal yang dimaksud adalah pihak-pihak yang akan menjadi koordinator atau *leader* dalam mengawal program ini. Penyaringan siapa saja praktisi dan *stakeholder* lokal sudah dilakukan saat *baseline* studi, sehingga pada tahap ini hanya tinggal mengundang dan mengajak berperan aktif dalam pembuatan LFA yang lebih konkrit. Praktisi dan *stakeholder* lokal inilah yang mengetahui lebih detail dan pasti bagaimana program dapat berjalan dengan lancar.

Output dari tahap *workshop* praktisi dan *stakeholder* lokal adalah: Kesepakatan LFA program (detail)

Tahap 3 dan 4 Ujicoba program dan Evaluasi program:

Pada tahap ini, LFA yang telah disepakati mulai diujicobakan pada lokasi terpilih. Uji coba program dilakukan dalam rentang waktu tertentu (1 tahun penuh misalnya) dan dikawal langsung oleh pemilik program (Pemda misalnya), sehingga dapat diketahui proses yang terjadi terkait program yang sudah direncanakan dalam LFA. Selain itu, juga dapat dilakukan evaluasi langsung terhadap program yang telah berjalan untuk selanjutnya dapat disempurnakan menjadi LFA final yang baku.

Output dari tahap ini adalah:

LFA final program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga.

Tahap Pelaksanaan program:

Pada tahap pelaksanaan program ini, pemilik program sudah mulai melibatkan penuh *stakeholder*, pemilik program hanya melakukan *supervise* saja terhadap pelaksanaan program.

Keseluruhan proses penyusunan intervensi program ini menggunakan metode LFA (*Logical Framework Approach*). LFA ini akan menjadi acuan dasar dalam menjalankan program. LFA pertama kali diperkenalkan oleh Leon J. Rosenberg dan digunakan sejak tahun 1969 oleh USAID. *Logical Framework* atau disingkat *logframe* kemudian digunakan oleh organisasi-organisasi lainnya seperti CIDA, DFID, UNDP dan organisasi LSM di seluruh dunia.

Logframe digunakan secara luas karena mengharuskan berpikir terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan resiko. *Logical Framework* adalah alat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dari *project/program*. *Logframe* membutuhkan pengetahuan dan informasi yang cukup untuk mampu digunakan sebagai alat perencanaan program/*project*. Dalam penyusunan LFA, berikut tahapan yang dilakukan:



Pada bagan tersebut, hasil *baseline* menjadi sangat penting dalam analisis situasi. Pada bagian ini, para pakar yang dilibatkan akan mengisi ruang analisis strategi dan pembuatan matriks. Matriks *logframe* setidaknya akan menjelaskan keterkaitan hirarki logis mulai dari input, aktifitas, *output*, *purpose* dan *goal* dari *project*. Matriks juga menerangkan setiap hirarki logis tersebut dengan indikator, alat verifikasi indikator dan asumsi yang digunakan.

Gambar 3
Tahapan Penyusunan LFA

Ada 2 analisis logis yang digunakan; yaitu analisis logis vertikal dan analisis logis horizontal. Analisis vertikal dilakukan menjelaskan mengapa dan bagaimana project akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat. Analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan.

Berikut contoh dari LFA terkait program keluarga:

Timeframe: 3 tahun

Jumlah anggaran: Rp 350juta

Pilot project: Kelurahan Prenggan, Yogyakarta

HIRARKI LOGIS	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI INDIKATOR	ASUMSI DAN RESIKO
GOAL/ TUJUAN- Menjadikan anak-anak di Prenggan generasi jujur.	Anak-anak menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari hingga ia dewasa (memegang jabatan publik). <i>Knowledge (awareness)</i> 1. Anak-anak, orangtua, dan agen sosialisasi sekunder memahami definisi kejujuran. Hasil baseline 2013: Jujur menurut orangtua dan anak "Berkata benar / apa adanya" 80%-90% Target : 2018, meningkat pemahamannya bukan sekedar jujur dalam ucapan, tapi juga jujur dalam tindakan, yaitu sebesar 10 %. 2. Orangtua mengetahui fungsi keluarga (3 fungsi utama) Hasil baseline 2013: Hanya 52,2% orangtua yang mengetahui fungsi sosialisasi Hanya 55,7% orangtua yang mengetahui fungsi afeksi Hanya 37,6% orangtua yang mengetahui fungsi identitas sosial. Target : 2018, meningkat pemahamannya menjadi sebesar 70 %.	- <i>Post- intervention survey</i> - Penelitian longitudinal kerjasama dengan psikolog	Asumsi: Orangtua mengikuti seluruh program intervensi yang dilakukan. Resiko: Ada faktor pengaruh media yang perlu diantisipasi.

HIRARKI LOGIS	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI INDIKATOR	ASUMSI DAN RESIKO
	- <i>Belief</i>: Orangtua meyakini bahwa kejujuran merupakan nilai utama dalam kehidupan. Hasil <i>baseline</i> 2013: Orangtua yang menginternalisasi nilai kejujuran sebagai nilai utama di Yogya hanya 18.9%. Target: 2018, meningkat menjadi sebesar 30% - <i>Behaviour</i>: 1. Anak-anak menerapkan nilai kejujuran 2. Orangtua dan agen sosialisasi sekunder menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran Hasil <i>baseline</i> 2013: Hanya 2% keluarga di Yogya yang menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupannya (diakui oleh anak). Target: 2018 meningkat menjadi sebesar 10%.		

Contoh LFA detail Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga ditunjukkan dalam lampiran.

Ada beberapa instrument yang penting untuk diperhatikan dalam rangka memudahkan/memandu pelaksanaan intervensi program pencegahan korupsi berbasis keluarga:

1. Dokumen LFA final
2. Modul 'Agar Anak Jujur' untuk orangtua beserta alat peraga dan media pembelajaran lainnya
3. Buku harian orangtua (pemantauan perkembangan anak)
4. Modul Relawan Ber-Aksi
5. Buku aktivitas relawan
6. Buku *Family Visit* relawan

Dalam pelaksanaan intervensi, perlu diperhatikan keluarga sasaran intervensi yang menjadi prioritas program ini. Sehingga saat pengukuran, maka akan dilihat bagaimana perubahan dari keluarga sasaran intervensi ini.



PENGUKURAN **PROGRAM**

Dalam pilot project yang KPK lakukan, belum dilakukan pengukuran pasca intervensi.

Berkaitan dengan pengukuran intervensi, setidaknya ada dua metode yang digunakan yaitu:

1. *Survey awareness* dan perilaku:

Survey ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana dampak dari intervensi yang dilakukan terhadap kalangan orangtua, anak, dan stakeholder yang terkait di lokasi intervensi.

Tujuan secara detail adalah mengukur:

- *Awareness* kejujuran,
- Perilaku kejujuran,
- Sejauh mana upaya yang dilakukan orangtua dan *stakeholder* lain terkait internalisasi nilai kejujuran kepada anak,
- Hambatan dan tantangan dalam melakukan internalisasi kejujuran,
- Evaluasi intervensi yang telah dilakukan

2. Penilaian psikologi:

Penilaian psikologi dilakukan secara longitudinal kepada anak-anak dari keluarga sasaran intervensi untuk melihat bagaimana dampak dari intervensi yang dilakukan.

Dalam *pilot project* yang KPK lakukan, belum dilakukan pengukuran pasca intervensi.

04

faktor keberhasilan dan penghambat program

Bagian ini menerangkan variabel-variabel penting yang perlu mendapat perhatian penyelenggara program pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga



FAKTOR
**KEBERHASILAN
PROGRAM**

Dalam setiap lokasi intervensi, terdapat faktor keberhasilan dan penghambat program yang berbeda-beda. Namun berdasarkan pengalaman KPK, berikut beberapa faktor yang dapat mempercepat keberhasilan program di suatu wilayah:

1. Homogenitas etnis dan agama:

Homogenitas etnis dan agama suatu masyarakat merupakan potensi besar dalam pembangunan budaya kejujuran. Hal ini disebabkan secara holistik dan integral masyarakat memiliki sistem gagasan, sistem sosial, dan sistem artefak yang relatif sama. Hal ini juga memungkinkan adanya nilai-nilai budaya dan agama yang relatif kuat, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan intervensi. Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat ini hanya perlu diperkuat dan direvitalisasi peranannya melalui sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi program pembangunan budaya kejujuran.

2. Profil demografi masyarakat yang relatif sama:

Misalnya tingkat pendidikan (angka buta huruf) dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pendukung yang signifikan karena kondisi sosial seperti ini cukup ideal bagi proses transformasi sosial. Artinya, proses pembangunan dan pemberdayaan dapat lebih cepat dilakukan dalam masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan tidak terdapat kesenjangan yang berarti. Kondisi ini akan memberikan dukungan yang berharga terhadap pelaksanaan program pembangunan budaya kejujuran di lokasi intervensi.

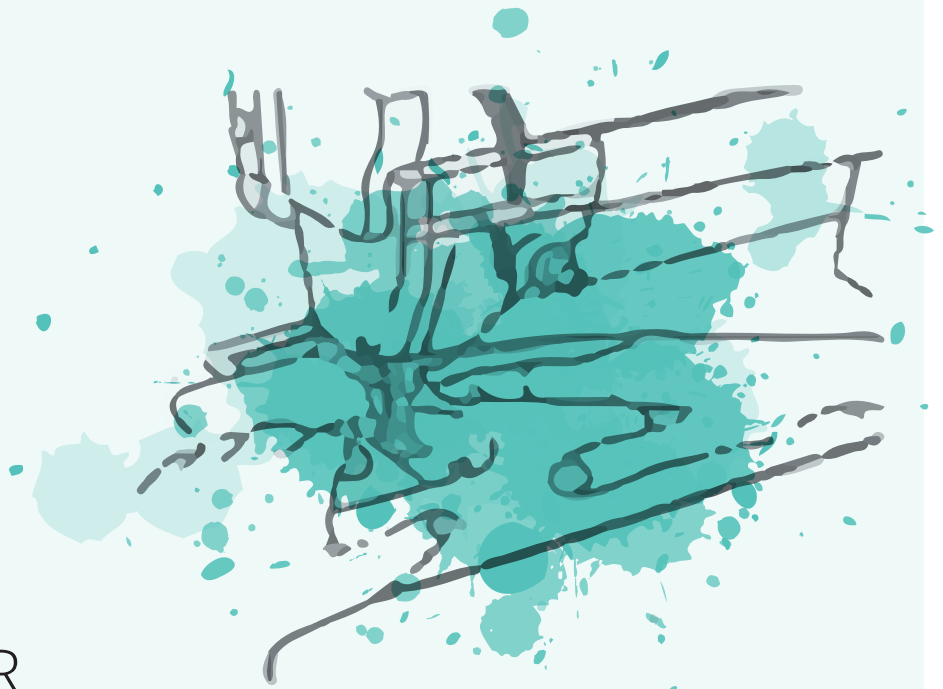
3. Kesamaan persepsi bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik:

Masyarakat yang memiliki kesamaan persepsi bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianutnya akan dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat untuk membudayakan nilai-nilai antikorupsi dalam masyarakat. Sehingga program pembangunan budaya kejujuran diyakini akan mendapatkan respon positif di masyarakat.

4. Tipe masyarakat yang semi tradisional – modern:

Maksudnya adalah masyarakat yang masih kuat memegang adatnya, tetapi juga tidak menolak masuknya budaya modern. Kondisi ini menegaskan bahwa adat dapat dijadikan kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang sejalan dengan budaya kejujuran, sebaliknya sikap terbuka masyarakat terhadap nilai-nilai baru juga dapat dijadikan pintu masuk untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi program pembangunan budaya kejujuran dalam rangka menguatkan nilai-nilai kejujuran tersebut dalam keluarga.

5. Terdapat institusi-institusi sosial yang kuat:
Kerjasama antarinstitusi sosial yang ada di lokasi intervensi harus terjalin dengan baik sehingga saling mendukung satu sama lain. Hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan program pembangunan budaya kejujuran dalam keluarga secara integratif karena akan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi sosial dan *stakeholder* lainnya.



FAKTOR
**PENGHAMBAT
PROGRAM**

Setiap lokasi memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Berikut beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan program di suatu wilayah berdasarkan pengalaman KPK:

1. Heterogenitas suku dan agama:
Semakin heterogen suatu suku dan agama, maka pelaksanaan program harus kreatif dalam mengkomunikasikan program dan mengkonsolidasikan unsur-unsur dalam masyarakat.
2. Masyarakat yang modern:
Modernitas meminggirkan nilai-nilai tradisional yang mengakar di masyarakat, masyarakat modern juga cenderung individualistik dan materialistis. Selain itu, institusi sosial juga tidak terlalu kuat dalam masyarakat ini. Tantangan tersendiri dalam melihat nilai-nilai apa yang dapat dikuatkan untuk keberhasilan program.
3. Pemerintahan lokal yang formalistik:
Pemerintahan yang sifatnya formal, cenderung birokratis akan sangat sulit diajak kerjasama dalam menjalankan program ini. Terutama pemerintahan yang berorientasi program kerja dan anggaran, akan sulit memahami perspektif bahwa ini merupakan program jangka panjang yang akan menjadi milik masyarakat.

05

penutup

Bagian ini mengurai harapan terhadap
Pemerintah Daerah dan Pemangku
Kepentingan Lainnya



PENUTUP

Korupsi merupakan penyakit bangsa yang telah merasuki ke dalam sendi-sendi kehidupan. Orangtua yang diharapkan dapat menyemai dan memupuk nilai-nilai kebaikan, perlahan dikotori oleh perilaku korup ayah atau ibunya.

Program pencegahan korupsi berbasis keluarga dibuat dengan harapan orangtua kembali menjalankan fungsi keluarga, setidaknya fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, dan fungsi identitas social. 3 fungsi ini dirasakan penting untuk menjadikan generasi Indonesia di masa datang menjadi generasi yang jujur. Selain itu, pemahaman dan keteladanan orangtua terkait kejujuran dan anti korupsi menjadi kunci penting bagi keberhasilan program.

Buku panduan ini disusun agar dapat menjadi salah satu referensi bacaan bagaimana menguatkan kembali fungsi keluarga. Tentu saja buku ini bukan satu-satunya referensi. Apa yang KPK lakukan juga masih butuh banyak penyempurnaan dan perbaikan.

Sehingga, KPK berharap pihak-pihak yang akan menyelenggarakan program ini dapat berpartisipasi dalam mewarnai penguatan fungsi keluarga demi terciptanya generasi jujur di masa datang.

Pemerintah daerah menempati posisi strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Kepala Daerah merupakan pucuk tertinggi pemerintah daerah. Atas kuasa yang dimilikinya, Kepala Daerah dituntut secara nyata membangun dan menguatkan fungsi keluarga di wilayah yang dipimpinnya.

BKKBN juga menempati posisi penting bagi terlaksananya program ini dikarenakan BKKBN memiliki penyuluh yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini. Pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Kemasyarakatan maupun Keagamaan juga dapat berperan dalam mengambil peran untuk menguatkan fungsi keluarga. KPK tidak dapat bekerja sendirian, karena pemberantasan korupsi bukan hanya di pundak KPK, tapi berada di tangan seluruh elemen bangsa yang menginginkan bangsa ini lebih bermartabat, bersih, sejahtera, dan berkeadilan.

- Aziz, Abdul. 2006. *Esai-esai Sosiologi Agama*. Jakarta: Diva Pustaka, hal. 23.
- Baihaqi, Mlf. 2007. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan*. Bandung: Nuansa
- Bronitt, Simon. 2016. *The Regulatory Pyramid*. University of Queensland.
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fildes, Alistair. 2016. *Normative compliance, legitimacy, and procedural justice*. Griffith University.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Gong, T. And Stephen K. Ma (2012) . *Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity*. New York: Routledge Asia Series.
- Harisson, Lawrence E. dan Samuel P. Huntington (Ed.). 2006. *Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Jakarta: LP3ES.

DAFTAR PUSTAKA

- John de Santo & Agus Cremers (ed). 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral* .Yogyakarta: Kanisius
- Labelle, H (2009). *Anti Corruption and the Sustainable Development Platform*.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Transparency International's Paper on the the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Regional Seminar on Political Economy of Corruption in Manila
- USAID (2005). *An Anticorruption Reader: Supplemental Sources on Transparency, Accountability, Prevention, Enforcement and Education*. Maryland: the IRIS Centre.
- Uslaner, E.M. (2005). *Trust Culture and Corruption*. Maryland: the IRIS Centre.